



**PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA DAN
PERANANNYA DALAM PENGUATAN EKSISTENSI
PROFESI DALANG (1971-2013)**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

Wulandari Puspaningrum

NIM 13030113140078

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Wulandari Puspaningrum, menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/ skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 13 Februari 2018.
Penulis,

Wulandari Puspaningrum
NIM 13030113140078

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people”

Mahatma Gandhi

PERSEMBAHAN

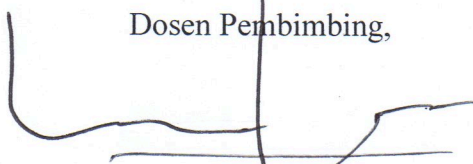
Dengan terselesainya skripsi ini maka penulis
mempersembahkannya kepada:

Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI)
dan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia
(SENAWANGI)

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Dhanang Respati Puguh., M. Hum.

NIP 19680829 199403 1 001

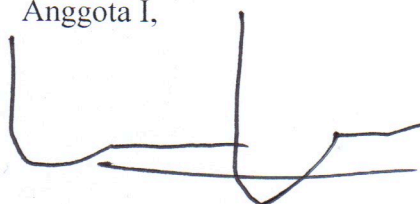
Skripsi dengan judul “Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) dan Perananannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang 1971-2013” yang disusun oleh Wulandari Puspaningrum (13030113140078) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018.

Ketua,



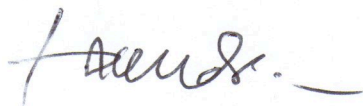
Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.
NIP 19540725 198603 2 001

Anggota I,



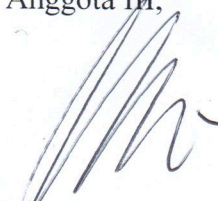
Dr. Dhanang Respati Puguh., M.Hum.
NIP 19680829 199403 1 001

Anggota II,



Mahendra Pudji Utama, S.S, M.Hum.
NIP 19710224 199903 1 001

Anggota III,



Drs. Sugiyarto, M.Hum.
NIP 19550807 198903 1 002

Mengesahkan,

Dekan



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, dan karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) dan Peranannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang 1971-2013”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menempuh ujian akhir Program Strata-1 di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan izin serta kemudahan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rabith Jihan Amaruli, S.S., M.Hum., selaku dosen wali yang selama ini telah memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan akademik penulis.

Selanjutnya, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Dhanang Respati Puguh., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sangat sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Pemikiran dan gagasan-gagasan yang beliau kemukakan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga sampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A., Mahendra Pudji Utama, S.S, M. Hum., Drs. Sugiyarto, M. Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Penulis juga sampaikan terima kasih kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada segenap staf administrasi Departemen

Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang maksimal.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis yang sangat hebat, Bapak Suroso dan Ibu Rumsiyah yang telah memberikan bantuan moral, material, dan spiritual sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak tercinta Wahyu Wibowo, Diah Utami Putri, Heru Pratomo, dan Suhastomo yang turut memberikan bantuan material, motivasi dan doanya demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Damarjati Kukuh Prasetyo yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, serta mendoakan untuk keberhasilan penulis. Penulis sampaikan terima kasih juga kepada para sahabat-sahabat Maria, Winda, Puji, dan semua teman-teman sejarah angkatan 2013 atas dukungan dan semangat, motivasi, dan kebersamaanya selama ini.

Penulis sampaikan juga terima kasih kepada Pengurus Persatuan Pedalangan Indonesia dan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia yang bersedia memberikan banyak informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebudayaan.

Semarang, 13 Februari 2018.

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
SUMMARY	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KONDISI YANG MELATARBELAKANGI PERKEMBANGAN ORGANISASI PEDALANGAN	
A. Dunia Seni Pedalangan pada masa Awal Kemerdekaan sampai Masa Orde Lama	22
B. Dunia Seni Pedalangan pada masa Orde Baru	37
C. Dunia Seni Pedalangan pada masa Reformasi	44
BAB III PEMBENTUKAN ORGANISASI PEDALANGAN	
A. GANASIDI	48
B. PEPADI	60
BAB IV KELEMBAGAAN PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA	
A. Kepengurusan dan Keanggotaan	67
B. Kebijakan dan Program Kerja	76

	C. Pendanaan dan Mitra Kerja Sama	93
BAB V	PERANAN PERSATUAN PEDALANGAN INDONESIA DALAM Penguatan EKSISTENSI PROFESI DALANG	
	A. Peningkatan Kompetensi Dalang	100
	1. Sarasehan	101
	a. Sarasehan Non-pedalangan	101
	b. Sarasehan Pedalangan	110
	2. Lomba Pedalangan	116
	3. Konsolidasi Sanggar	117
	B. Penguatan Eksistensi Dalang	120
	1. Pergelaran	121
	a. Pergelaran Rutin	122
	b. Pergelaran Insidental	127
	2. Festival	130
	a. Festival Rutin	131
	b. Festival Insidental	136
	3. Pemberian Penghargaan	139
	4. Pelibatan dalam Misi Kesenian	142
	5. Media Informasi	144
BAB VI	SIMPULAN	149
	DAFTAR PUSTAKA	152
	DAFTAR INFORMAN	158
	LAMPIRAN	160

DAFTAR SINGKATAN

ASKI	: Akademi Seni Karawitan Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Deppen	: Departemen Penerangan
Diklat	: Pendidikan dan Pelatihan
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GANASIDI	: Lembaga Pembina Seni Pedalangan Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Habirandha	: HA-nganakake Bi-wara RAN-cangan DHA-lang
KKI	: Komite Kemanusiaan Indonesia
Kokar	: Konservatori Karawitan Indonesia
KOMDA	: Komisariat Daerah
KOMINFO	: Kementrian Komunikasi dan Informatika
LEKRA	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Menko	: Menteri Koordinator
MUNAS	: Musyawarah Nasional
PADRI	: Panunggaling Dalang Republik Indonesia
Padhasuka	: Pasinaon Dhalang Ing Surakarta
PANGKOWILHAN	: Panglima Komando Wilayah Pertahanan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PEPADI	: Persatuan Pedalangan Indonesia
PDMN	: Pasinaon Dhalang Mangkunagaran
PJP	: Pembangunan Jangka Panjang
Repelita	: Rencana Pembangunan Lima Tahun
SEKNEG	: Sekretariat Negara
SENAWANGI	: Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia
SMKI	: Sekolah Menengah Karawitan Indonesia

DAFTAR ISTILAH

<i>abdi dalem</i>	: Orang yang mengabdikan dirinya kepada raja atau keraton
<i>alam madya</i>	: Alam kehidupan di dunia
<i>alam purwa</i>	: Alam kandungan
<i>alam wasana</i>	: Alam kehidupan di akhirat
<i>antawacana</i>	: Suara dalang dalam pewayangan yang disesuaikan dengan tokoh sebenarnya
<i>art directing</i>	: Koordinator lapangan yang merancang desain tata artistic
Antiimperialisme	: Menolak terhadap penjajahan bangsa lain
<i>best shadow show</i>	: Pertunjukan wayang terbaik
budaya pinggiran	: Budaya yang dipandang rendah
<i>Broadspectrum</i>	: Gambaran yang luas
<i>Catur</i>	: Semua wujud wacana atau bahasa yang diucapkan oleh dalang dalam pentas pewayangan
<i>dahgelan</i>	: Lawak atau sebuah adegan yang menimbulkan kelucuan
<i>edipeni adiluhung</i>	: Indah dan bermutu tinggi
<i>ekaprasetya pancakarsa</i>	: Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
eksekusi	: Pelaksanaan hukuman badan peradilan
<i>gagrag</i>	: Ciri khas wayang kulit yang disesuaikan dengan wilayahnya
<i>gendhingan</i>	: Istilah umum untuk menyebut komposisi dalam karawitan Jawa
<i>gegebengan angger</i>	: Falsafah hidup negara
<i>ugering negari</i>	
<i>grand strategy</i>	: Strategi besar

<i>gara-gara</i>	: Bagian episode pertunjukan wayang yang menampilkan dialog jenaka dengan tokoh punakawan (Semar, Bagong, Gareng, Petruk)
<i>juru suluh</i>	: Juru Penerang
<i>janturan</i>	: Wacana dalang yang berupa deskripsi suasana adegan yang sedang berlangsung.
Kader	: Orang yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi yang mempunyai peran penting untuk membantu tugas dan fungsi pokok organisasi
<i>karawitan</i>	: Kesenian musik tradisional Jawa yang mengacu pada permainan musik gamelan
kawedanan	: Wilayah administrasi pemerintahan yang dipakai di beberapa provinsi pada masa Hindia Belanda
<i>keprakan</i>	: Bunyi yang dihasilkan dari keprak yang dimainkan oleh dalang untuk mendukung suasana adegan
komisariat	: Kantor anak cabang suatu organisasi
Kongres	: Pertemuan besar para wakil organisasi
kota madya	: Digunakan untuk membedakan antara kota besar (kota)
<i>lakon</i>	: Cerita wayang
<i>masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity</i>	: Sebuah penghargaan yang diberikan oleh UNESCO berupa warisan budaya tak berwujud
neokolonialisme	: Sistem penjajahan bentuk baru, negara-negara penjajah untuk dapat melakukan kontrol terhadap negara bekas koloni mereka dengan adanya rasa ketergantungan, hilangnya kontrol pemerintah, penjajahan dikuasai oleh pemilik modal.
<i>marionette</i>	: Boneka yang digunakan menggunakan benang atau tali dari atas

<i>pakem</i>	: Pedoman bagi calon dalang yang berisi berbagai ketentuan tentang pakeliran yang berfungsi untuk menjaga estetika seni pedalangan
<i>paugeran</i>	: Peraturan
<i>Pelog</i>	: Tangga nada dalam seni karawitan yang terdiri dari tujuh nada dalam satu oktaf (C D E F G A B)
<i>pengrawit</i>	: Penabuh gamelan atau musik karawitan
<i>rekstrukturisasi</i>	: Penataan kembali
revolusi	: Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat menyangkut dasar pokok kehidupan masyarakat.
<i>rumangsa melu</i> <i>ndarbeni, wajib melu</i> <i>anrungkebi, mulat</i> <i>saliro angrasa wani</i>	: Selalu ikut memiliki, wajib bertanggung jawab, dan senantiasa mawas diri
<i>sabet</i>	: Salah satu unsur pakeliran yang meliputi semua gerak dan penampilan boneka wayang di atas panggung atau layar yang disajikan oleh dalang
<i>sanggit</i>	: Karangan, gubahan, kreativitas atau hasil daya olah pikir
<i>sangkan paraning</i> <i>dumadi</i>	: Ajaran tentang tempat asal dan kembalinya manusia
<i>slendro</i>	: Tangga nada dalam seni karawitan yang terdiri dari lima nada dalam satu oktaf (C D E G A).
stabilitas politik	: Syarat pendukung pelaksanaan pembangunan suatu negara
<i>swaraswati</i>	: Pesindhen
<i>sulukan</i>	: Semua jenis lagu vokal yang dilantunkan oleh dalang untuk memberikan suasana dalam adegan pertunjukan wayang

- Wayang Gedhog* : Wayang kulit yang mengambil inti dari cerita panji
- Wayang Kulit Purwa* : Wayang kulit yang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabarata
- Wayang Madya* : Wayang kulit penyambung cerita wayang gedhog dan purwa, peralihan cerita purwa ke cerita panji
- Wayang Wong* : Wayang orang
- Wayang World Puppet* : Karnaval wayang dunia
- Carnival*
- Wewayangane ngaurip* : Gambaran hidup manusia sejak lahir hingga mati

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
4.1 Bagan Organisasi PEPADI	63
4.2 Pelantikan Pengurus PEPADI Provinsi oleh PEPADI Pusat	64
4.3 Bagan Kepengurusan PEPADI	68
4.4 Kegiatan Musyawarah Nasional PEPADI VI	72
4.5 Menko Polkam Soesilo Soedarman memberi pengarahan kepada ketua umum PEPADI Pusat Sampurno	74
5.1 Kegiatan dalam rangka Sarasehan Dalang Indonesia	93
5.2 Kegiatan Acara Peresmian Sarasehan Dalang Indonesia 1986	94
5.3 Sarasehan Program Gender dan Kesehatan Reproduksi	98
5.4 Kegiatan Seminar Pra Festival Wayang Dunia	105
5.5 Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis Pedalangan	109
5.6 Kegiatan Pergelaran Wayang Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah	115
5.7 Kegiatan Festival Dalang Bocah	124
5.8 Kegiatan Festival Wayang Dunia	126
5.9 Kegiatan dalam rangka Festival Wayang Dunia	127
5.10 Kegiatan Misi Kesenian di Thailand	134
5.11 Contoh Bentuk Penerbitan Warta PEPADI	136
5.12 Contoh Majalah Dalang Ngumandang Terbitan PEPADI	137

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
A	Ketetapan Musyawarah Nasional VI PEPADI	151
B	Pengesahan Serah Terima Jabatan Ketua Umum PEPADI Pusat	153
C	Ketetapan Musyawarah Nasional PEPADI III Tahun 1996 tentang Tata krama Dalang Indonesia.	154
D	Ketetapan Pengurus PEPADI Pusat dalam Musyawarah Nasional III Tahun 1996	156
E	Contoh Kartu Anggota PEPADI	158
F	Ketetapan Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Musyawarah Nasional PEPADI	159
G	Ketetapan Penyempurnaan Pengurus Baru Tahun 1999	160
H	Surat Keputusan Penyelenggaraan Sarasehan Dalang Indonesia 1986	161
I	Laporan Keuangan PEPADI Periode 1979-1996	164
J	Laporan Keuangan PEPADI Periode 1996-2003	165
K	Laporan Keuangan PEPADI Periode 2003-2008	166
L	Laporan Keuangan PEPADI Periode 2008-2014	167
M	Surat Keputusan Pendirian Koperasi PEPADI	168
N	Surat Keputusan Pelaksanaan Dalang Bocah Tahun 2009	170

INTISARI

Skripsi dengan judul “Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang 1971-2013” membahas tentang perkembangan PEPADI dan peranannya dalam penguatan eksistensi profesi dalang 1971-2013. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan secara berurutan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan konsep tentang organisasi dan peranan. Adapun ruang lingkup keilmuannya adalah sejarah sosial budaya.

Pada masa awal kemerdekaan, perkembangan seni pedalangan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat dengan pendirian sekolah formal pedalangan dan kursus pedalangan. Perkembangan seni pedalangan juga dipengaruhi oleh partai politik pada masa rezim Orde Lama khususnya PKI yang mendirikan LEKRA. Para dalang saat itu tertarik bergabung dan menyuarakan dukungannya kepada pemerintah melalui pertunjukan wayang. Tragedi September 1965 memberikan kekecewaan bagi para dalang yang menjadi korban dari akhir pergerakan di masa Orde Lama menuju Orde Baru. Rezim Orde Baru memahami akan pengaruh dalang di tengah masyarakat sehingga pada 1969 dibentuk sebuah organisasi pedalangan bernama GANASIDI. Organisasi ini merupakan rencana pemerintah untuk mewujudkan program pembangunan dan melindungi para dalang dari pengaruh beberapa partai politik pada masa Orde Lama. Rencana pembentukan organisasi yang bersifat nasional menjadi bagian dari keputusan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh GANASIDI yang menghasilkan keputusan rencana pembentukan organisasi dalang yang bersifat nasional bernama PEPADI. Perkembangan PEPADI telah berlangsung sejak Orde Baru sampai masa reformasi. Selama Orde Baru dalang dijadikan sebagai sarana menyampaikan program pemerintah khususnya Golkar. Reformasi membuka kebijakan politik menjadi lebih demokratis dan membuka peluang para dalang untuk bergerak bebas dalam menyatakan dukungan terhadap partai lainnya. Hal itu dijadikan dalang sebagai sebuah peluang kerja. PEPADI berupaya melestarikan dan mengembangkan seni pedalangan. PEPADI mempunyai tingkatan wilayah kerja yaitu tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. PEPADI selama periode 1975-2013 telah dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Sampurno, Solichin, dan Eko Tjipto. PEPADI mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatannya dengan bantuan yang diberikan Presiden, donatur serta menjalin kerja sama program dengan pihak pemerintah maupun swasta. Kegiatan PEPADI meliputi peningkatan kompetensi dalang melalui sarasehan, lomba pedalangan dan konsolidasi sanggar pedalangan; serta penguatan eksistensi dalang melalui pergelaran, festival, pemberian penghargaan, pelibatan dalam misi kesenian serta penerbitan media informasi pewayangan.

Kata Kunci: Seni pedalangan, organisasi, Orde Lama, Orde Baru, GANASIDI, PEPADI

SUMMARY

Undergraduate Thesis entitled “Persatuan Pedalangan Indonesia and their role in strengthening dalang’s existence 1971-2013” discusses about development of PEPADI and their role in strengthening dalang’s existence 1971-2013. This research was done by using historical method consist of four steps in sequence, there are heuristic, critic, interpretation, and historiography. This research used concept about organization and role. Disciplines that used in this research were socio-cultural history.

In the early of independence, the development of pedalangan got attention from government and society by establishing of pedalangan formal schools and pedalangan course schools. The development of pedalangan also affected by politic organization in Orde Lama especially PKI that established LEKRA. At that time, dalang was interested and spread their support for government through wayang performance. The tragedy of September 1965 caused disappointment of dalangs that became victim of movement in Orde Lama through Orde Baru. Regime of Orde Baru was understood of dalang’s affection in society so in 1969 the government created an pedalangan Organization called GANASIDI. This organization was part of government’s plan in developing country and also protected dalangs from affected by some politics organization in Orde Lama. This establishment of organization plan to become national organization was part of decision in national conference held by GANASIDI. The conference resulted about the plan of establishment dalang organization in national called PEPADI. PEPADI’s development has been done since Orde Baru through Reformasi. In Orde Baru dalang was made for medium of government’s program especially Golkar. Reformasi created political policy became more democratic and created opportunity for dalangs to move freely for declaring support through another parties. This was made dalang as a chance to do their job. PEPADI was tried to preserve and developing pedalangan arts. PEPADI had levels of region consist of national level, province, and district/city. PEPADI in 1975-2013 had been led by chairman Sampurno, Solichin, and Eko Tjipto. PEPADI got funds to do their activity with some help given by president, sponsorship, also made cooperation between government and private. Activities of PEPADI consisted of raising dalang’s competence through workshop, did pedalangan competition and did consolidation to pedalangan courses; also strengthening dalang’s existence through performance, festival, giving awards, joined in art mission and published of pewayangan information in media.

Keyword: Pedalangan arts, organization, Orde Lama, Orde Baru, GANASIDI, PEPADI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Perkembangan seni pedalangan di kerajaan Surakarta dan Yogyakarta, berdasar pada tradisi lisan tidak lepas dari peranan seorang tokoh legendaris dalang yang bernama Kyai Panjang Mas. Ia adalah *abdi dalem* dalang pada zaman Mataram yaitu pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645). Nama asli Kyai Panjang Mas adalah Kyai Mulya Lebda Jiwa. Kyai Panjang Mas merupakan seorang *abdi dalem* yang mempunyai keterampilan dalam dunia pedalangan pada masa itu. Gaya pedalangan Kyai Panjang Mas memiliki pengaruh terhadap tradisi pedalangan di keraton yaitu kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta. Tradisi lisan tersebut juga berkembang dalam masyarakat pewayangan dan para dalang di daerah Surakarta dan Yogyakarta.¹

Kepedulian pihak kerajaan mempunyai pengaruh besar dalam pembinaan seni pedalangan. Para raja di Surakarta dan Yogyakarta dalam usaha membina dan mengembangkan dunia pewayangan mulai memikirkan adanya pendidikan formal dalang yaitu di antaranya dengan pendirian Padhasuka oleh Paku Buwana X pada 1923 di Museum Radya Pusaka Surakarta. Pendidikan dalang Padhasuka dibina oleh beberapa orang tenaga pengajar yaitu di antaranya seperti Dutadilaga, Dipawiyata, dan Atmacendana atau Nayawirangka, sedangkan karawitan oleh Warsapradangga.² Pembukaan sekolah dalang pada 1923 mengakibatkan adanya perubahan dalam pendidikan dalang, dari sistem transformasi pengetahuan yang diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan lebih (sistem *Nyantrik*) ke sekolah atau kursus. Keputusan para dalang dalam mengikuti kegiatan kursus dalang

¹Soetarno, "Gaya Pedalangan Wayang Kulit Purwa Serta Perubahannya", *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Volume 26 No. 1, Januari 2011, hlm. 2

²Soetarno, "Gaya Pedalangan Wayang Kulit Purwa Serta Perubahannya", *MUDRA Jurnal Seni Budaya*, Volume 26 No. 1, Januari 2011, hlm. 2-3.

merupakan suatu upaya dalam meningkatkan kemampuannya. Hal tersebut dikemukakan dengan alasan sebagai berikut: Alasan pertama yaitu adanya mandat dari Keraton kepada dalang untuk mengikuti kegiatan sekolah dalang. Hal ini karena *Sabda Panindita Ratu* atau *Sabda Brahmana Raja* (perkataan Raja/ pendeta Brahmana) dianggap perintah wajib bagi para dalang untuk mematuhi ucapan yang disampaikan oleh Pakubuwana X atau dikenal sebagai Sunan Wicaksana. Alasan yang kedua yaitu untuk saling berbagi pengetahuan dan keinginan para dalang sehingga dengan mengikuti sekolah dalang di keraton maka tercipta peluang menuju kesuksesan di masa mendatang. Alasan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan derajat para dalang supaya dalang tidak dianggap sebagai orang terbelakang dan sulit beradaptasi terhadap zaman, mengingat bahwa para dalang *ndesa* merasa tidak percaya diri dan merasa takut apabila para dalang terlibat dengan keraton karena dalang *ndesa* merasa tidak mengerti tata krama keraton.³

Adanya pendidikan formal pedalangan di Surakarta memengaruhi sikap Keraton Ngayogyakarta untuk membentuk pendidikan formal pedalangan, sehingga pada 27 Juli 1925 didirikan Habirandha atas perintah dari Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939). Habirandha merupakan pendidikan formal pedalangan dengan ciri khas tradisi di Keraton Ngayogyakarta yang diketuai oleh R.M Riya Ganda Atmaja dengan arahan BPH. Suryadiningrat dan K.R.T Jayadipama.⁴ Adanya pendidikan formal pedalangan di Keraton Surakarta dan Keraton Ngayogyakarta merupakan pendidikan pedalangan pertama di Indonesia.⁵

Seni pewayangan dan pedalangan juga mendapat perhatian di Mangkunegaran pada masa Mangkunegaran VII, yaitu dengan membuka Pasinaon Dalang Mangkunegaran (PDMN) sebagai sekolah pedalangan pada 1931. Alasan pembukaan sekolah para dalang di Mangkunegaran disebabkan oleh pendirian

³Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 60

⁴Sri Mulyono, *Wayang, Asal-Usul, dan Masa Depan* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 92.

⁵Soetarno, "Gaya Pedalangan Wayang Kulit Purwa Serta Perubahannya", hlm. 2-3.

Padhasuka di Kasunanan Surakarta. Pendirian PDMN memberikan kontribusi besar dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkup pedalangan. PDMN memiliki tujuan yaitu mempersiapkan para siswa menjadi tenaga profesional untuk menghadapi lapangan pekerjaan pada bagian pedalangan, mempersiapkan siswa untuk berkompeten dan dapat berkembang di bidang seni pedalangan, dan menjadikan lulusannya sebagai pengembang budaya dalam bidang pedalangan yang produktif, kreatif, inovatif, dan adaptif. PDMN memiliki strategi pembelajaran dengan tiga aspek yaitu *catur*, *sabet*, dan *iringan*. Para siswa diberikan materi pengetahuan tentang dalang, wayang, apresiasi seni, sastra pedalangan, lakon, dan pengkayaan *sanggit* dalam meningkatkan kemampuan intelektual. Kemampuan PDMN dalam bidang seni pedalangan diakui dengan dihasilkannya tenaga pengajar seni pedalangan yang kemudian memberikan kontribusi pengetahuannya di beberapa lembaga formal pedalangan pada masa Orde Lama.⁶

Kesenian merupakan salah satu bagian yang mencangkup bidang kebudayaan. Kesenian mengalami perkembangan sesuai dengan situasi yang terjadi dalam perkembangan budaya.⁷ Pada masa awal kemerdekaan di Indonesia, yakni pada masa kepemimpinan Soekarno, seni pedalangan tidak lagi bernaung di pihak keraton, namun telah mengalami perkembangan dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat. Peranan pemerintah dan masyarakat terhadap para seniman pedalangan ditujukan dengan pendirian beberapa sekolah formal serta kursus pedalangan yang mengajarkan pengetahuan pedalangan.⁸ Pada masa Orde Lama, perhatian terhadap seni pedalangan juga diberikan melalui beberapa partai politik salah satunya Partai Komunis Indonesia (PKI), yang menggunakan peranan dalang dalam menggerakkan rakyat untuk tujuan kepartaian dengan membentuk

⁶M.Jazuli, "Model Pewarisan Kompetensi Dalang", *Jurnal Harmonia*, Volume XI, No. 1/Juni 2011, hlm.74.

⁷Umar Kayam, *Seni, Tradisi, Masyarakat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 15-16.

⁸Sri Mulyono, *Wayang, Asal-Usul, dan Masa Depan*, hlm. 99.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA). Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965, memberikan nasib buruk bagi para dalang yang terlibat dalam lembaga kebudayaan yang berafiliasi dengan partai komunis. Partai tersebut beserta lembaga yang merupakan bagian dari pengikutnya dibubarkan. Peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 itu memberikan kekecewaan bagi para dalang terhadap pemerintah. Hal itu lebih dirasakan ketika pemerintah memberikan kebijakan terhadap para dalang. Para dalang kemudian diperintahkan agar selalu meminta izin setiap melaksanakan kegiatan pertunjukan kepada pihak pemerintah. Para dalang memandang perintah yang diberikan itu menghalangi kebebasan profesi dalang untuk menggelar pertunjukan wayang. Menurut para dalang bahwa pemerintah sama saja mencurigai setiap kegiatan yang dilakukan oleh dalang yang hal ini sangat mengancam kedudukan profesi dalang. Pemerintah kemudian memahami maksud para dalang dan berupaya memulihkan semangat kerja sama antara dalang dan pemerintah, namun di sisi lain pemerintah juga mempunyai misi terkait pemahaman mengenai peranan dalang dalam masyarakat untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia.⁹

Kebijakan pada masa akhir Demokrasi Terpimpin dan awal Orde Baru diarahkan untuk mendukung perubahan dalam mendorong kepentingan rakyat searah dengan kebijakan nasionalis Negara. Kebijakan pada masa Orde Baru dilandaskan pada falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila dengan tekanan utama pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, demikian juga atas UUD 1945. Orde Baru lebih mengutamakan akan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kemajuan Indonesia.¹⁰ Kebijakan Orde Baru ditunjukkan untuk mengarahkan masyarakat terhadap keberlangsungan di bidang pembangunan. Orde Baru mengutamakan arah pembangunan dengan mengubah arah kebijakan budaya yang semula merupakan bagian dari rencana politik Soekarno, kemudian diarahkan

⁹Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, hlm. 219-222.

¹⁰Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, hlm. 222.

untuk membangun sebuah masyarakat sosialis untuk mendukung pertumbuhan domestik yang dipimpin oleh Negara.¹¹

Pernyataan terhadap rencana pembangunan Indonesia ditunjukkan pada 1969 yaitu dengan direalisasikannya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita), yang bertujuan mewujudkan cita-cita Orde Baru. Fokus utama rencana pembangunan ini pada sektor pertanian, yang menunjang kebutuhan sehari-hari sebagian besar penduduk Indonesia. Untuk menggerakkan kaum tani, yang sebagian besar masih memiliki pola pikir tradisional, pemerintah membutuhkan peranan dalang dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Menanggapi rencana tersebut, Presiden mengusahakan penyelenggaraan pertemuan dengan para dalang. Tujuan dari pertemuan tersebut yaitu untuk menegaskan peranan kedudukan dalang di tengah masyarakat. Di sisi lain hal ini juga bisa dimaksudkan sebagai usaha dalam memperbaiki kembali hubungan antara pemerintah dan para dalang.¹²

Pada konferensi 1966, pemerintah berupaya memberikan penjelasan akan peranan dalang dalam menjalankan misinya. Penyelenggaraan pertemuan tersebut tujuannya yaitu untuk menjelaskan tugas dalang sebagai mediator dalam masyarakat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri dalam pidatonya di depan pertemuan, memberikan saran agar para dalang berorganisasi, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Seiring dengan hal itu, rencana pendirian organisasi dalang seperti yang disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebenarnya sudah berjalan dengan pendirian organisasi pedalangan bernama GANASIDI yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Upaya untuk mendirikan organisasi ini dipelopori oleh Surono yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal dan sebagai Panglima Komando Daerah Militer VII Diponegoro Jawa Tengah dan DIY. Organisasi seni pedalangan yang didirikan oleh Surono terus mengalami perkembangan yang kemudian berjalan seiring dengan pengangkatan Surono

¹¹Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia Kebijakan Budaya Selama Abad 20 hingga Era Reformasi*, hlm.173-175.

¹²Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, hlm. 222.

sebagai PANGKOWILHAN II Jawa dan Madura. Perkembangan organisasi pedalangan secara bertahap mengalami perluasan wilayah. Pada 14-15 April 1971 Surono berhasil membentuk organisasi dengan batas wilayah meliputi Jawa dan Madura. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan organisasi seni pedalangan terus berlanjut dengan penyelenggaraan konferensi pedalangan Jawa dan Madura yang dihadiri oleh wakil dari seluruh provinsi di Jawa dan Madura. Pada konferensi ini dikemukakan usul agar diusahakan terbentuknya suatu organisasi nasional pedalangan bagi seluruh Indonesia, yang kemudian dibentuk dengan nama Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI). Daerah kegiatan organisasi yang bernama PEPADI itu diperluas. Bersamaan dengan pengangkatan Surono sebagai wakil panglima angkatan bersenjata yang berkedudukan di Jakarta, daerah PEPADI diperluas meliputi seluruh wilayah Indonesia.¹³

PEPADI merupakan organisasi persatuan dan kesatuan serta pengabdian profesi dalang dalam mengembangkan seni pedalangannya. Organisasi PEPADI disusun secara bertingkat yaitu di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk mengembangkan fungsi dan tujuan organisasinya dalam pembinaan seni pedalangan, PEPADI menentukan arah kebijakan dengan menyusun beberapa program kegiatan meliputi konsolidasi organisasi, sistem kemitraan, pendidikan dan pelatihan, pergelaran wayang serta kesejahteraan anggota. Intitusi ini telah berperan di dalam perkembangan seni pedalangan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya PEPADI itu memiliki peranan yang signifikan bagi perkembangan dunia seni pedalangan di Indonesia. PEPADI telah berjalan sampai pada 2013, pada masa itu merupakan masa akhir periode kepemimpinan PEPADI pada masa ketua umum Eko Tjipto yang telah menjabat selama dua periode sampai pada 2013. Kepemimpinan Eko Tjipto selama dua periode itu telah membawa seni pedalangan dikenal oleh dunia atas kerja sama yang dilakukan oleh SENAWANGI dan PEPADI. Wayang mendapat penghargaan sebagai *Masterpiece of The Oral Intangible Heritage of Humanity* (Karya Agung Budaya Dunia) oleh UNESCO,

¹³Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, hlm. 225-233.

sebuah lembaga budaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PEPADI pada periode tersebut juga telah berhasil membuat sebuah pencapaian yang berkesan yaitu penyelenggaraan Festival Wayang Internasional terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yang diberi judul *Wayang World Puppet Carnival (WWPC)*, dengan dihadiri oleh 46 Negara. Indonesia berhasil meraih penghargaan tertinggi (*The Grand Carnival Prix Wayang*). Oleh karena eksistensinya dalam dunia seni pedalangan dan belum adanya kajian yang secara khusus membahas tentang PEPADI, maka skripsi ini akan mengangkat topik Persatuan Pedalangan Indonesia dan Perannya Dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang 1971-2013. Untuk memfokuskan kajian pembahasan akan di pandu dengan empat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi yang melatarbelakangi perkembangan organisasi pedalangan pada masa awal kemerdekaan sampai pada masa reformasi?
2. Bagaimana proses pembentukan organisasi PEPADI?
3. Bagaimana kelembagaan organisasi PEPADI?
4. Bagaimana peranan PEPADI dalam peningkatan eksistensi profesi dalang?

B. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam suatu karya ilmiah mutlak memerlukan ruang lingkup, mengingat luasnya masalah dalam kehidupan masyarakat. Setiap penulisan sejarah dituntut untuk menentukan batas-batas dari topik yang dibahas agar dapat diperoleh suatu kejelasan pemahaman. Permasalahan yang ada sewajarnya dibatasi sesuai dengan topik yang diangkat.

Segala peristiwa tindakan manusia pada masa lalu tidak semua bisa dikategorikan dalam sejarah sebagai kisah atau narasi. Semua itu barulah letupan-letupan atau kepingan-kepingan yang bisa dipertimbangkan untuk bisa menjadi bagian dalam sejarah. Semua itu barulah bisa dianggap sejarah apabila masing-masing kepingan itu bisa dikaitkan dalam konteks historis, dan oleh karena itu perlu

adanya dimensi waktu yang jelas.¹⁴ Batasan ruang lingkup dalam penelitian diperlukan agar penelitian dapat lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.¹⁵ Ruang lingkup penelitian juga dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek penelitian yang mencakup lingkup temporal, lingkup spasial, dan lingkup keilmuan.

Ruang lingkup temporal dalam skripsi ini adalah 1971 sampai 2013. Batasan awal 1971 dengan alasan bahwa tahun itu merupakan tahun pendirian organisasi seni pedalangan yang bernama PEPADI atas prakarsa dari Jenderal Surono yang pada saat itu menjabat sebagai PANGKOWILHAN II Jawa dan Madura pada 14 April 1971 dalam Musyawarah Pedalangan se-Jawa dan Madura Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai organisasi yang bersifat nasional. Batasan akhir tahun 2013 dengan alasan bahwa pada tahun itu merupakan masa akhir periode kepemimpinan PEPADI pada masa ketua umum Eko Tjipto yang telah menjabat selama dua periode sampai pada 2013. Kepemimpinan Eko Tjipto selama dua periode itu telah membawa seni pedalangan dikenal oleh dunia atas kerja sama yang dilakukan oleh SENAWANGI dan PEPADI. Wayang mendapat penghargaan sebagai *Masterpiece of The Oral Intangible Heritage of Humanity* (Karya Agung Budaya Dunia) oleh UNESCO, sebuah lembaga budaya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PEPADI pada periode tersebut juga telah berhasil membuat sebuah pencapaian yang berkesan yaitu penyelenggaraan Festival Wayang Internasional terbesar sepanjang sejarah di Indonesia yang diberi judul *Wayang World Puppet Carnival* (WWPC), dengan dihadiri oleh 46 Negara. Indonesia berhasil meraih penghargaan tertinggi (*The Grand Carnival Prix Wayang*).

Ruang lingkup spasial merupakan suatu batasan yang didasarkan pada kesatuan wilayah geografis atau satuan wilayah administratif tertentu yang bisa meliputi desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya. Dalam skripsi ini

¹⁴Taufik Abdullah, "Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi", dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, (ed), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. xii

¹⁵Taufik Abdullah, editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 10.

batasan lingkup spasialnya adalah Nasional (Persatuan Pedalangan Indonesia Pusat).

Ruang lingkup keilmuan adalah batasan dari salah satu atau beberapa aspek yang akan dibahas dalam skripsi. Oleh karena permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah PEPADI dan peranannya dalam pembinaan dunia seni pedalangan 1971-2013, maka lingkup keilmuan skripsi ini dapat dikategorikan sebagai sejarah sosial budaya, karena peran organisasi PEPADI dalam upaya pelestarian dan pengembangan seni pedalangan sebagai khasanah unggulan kebudayaan nasional yang dalam hal ini berkaitan dengan pembinaan para dalang, pengrawit, dan swarawati yang merupakan seniman pedalangan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang permasalahan dan ruang lingkung di atas, didalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, menjelaskan kondisi yang melatarbelakangi perkembangan organisasi pedalangan pada masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Hal ini ditunjukkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi yang melatarbelakangi perkembangan organisasi pedalangan yang bernama PEPADI. Kedua, menjelaskan proses pembentukan organisasi pedalangan GANASIDI dan PEPADI. Pembentukan organisasi pedalangan ini ditunjukkan untuk menjelaskan proses pendirian PEPADI yang diawali dari pendirian GANASIDI sebagai organisasi pedalangan. Ketiga, menjelaskan dimensi kelembagaan organisasi PEPADI. Dimensi ini menjelaskan mengenai struktur kepengurusan dan keanggotaan serta arah kebijakan suatu program dan dukungan para pecinta seni dalam meningkatkan perkembangan suatu organisasi dengan fokus tujuan pelestarian dan pengembangan seni pedalangan. Keempat, menjelaskan Peranan PEPADI dalam penguatan eksistensi profesi dalang. Hal ini berkaitan dengan kebijakan yang dirumuskan oleh PEPADI terhadap suatu program-program yang diberikan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan penguatan eksistensi bagi para anggotanya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang seni pedalangan telah banyak dilakukan oleh beberapa orang peneliti dari berbagai bidang ilmu, namun di antara beberapa kajian tersebut belum dapat ditemukan karya sejarah yang membicarakan tentang dunia seni pedalangan. Tidak semua kajian itu akan dibahas dalam bagian ini, tetapi hanya beberapa karya penting yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi ini.

Pustaka pertama adalah buku karya Sri Mulyono berjudul *Wayang, Asal Usul, dan Masa Depan*.¹⁶ Buku ini membahas mengenai asal usul wayang dan sejarahnya yaitu perkembangan wayang kulit purwa dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan, pengertian dalang dan peranannya serta beberapa peristiwa terkait tentang kegiatan pewayangan. Asal mula wayang bersumber pada upacara agama terhadap pemujaan “Hyang” yang telah ada sejak masa prasejarah. Pertunjukan wayang kulit merupakan hasil dari kreasi orang Indonesia di Jawa. Pertunjukan wayang bukan hanya untuk kesenangan melainkan memiliki arti keagamaan yang berhubungan dengan kepercayaan untuk memuja roh “Hyang” untuk memanggil roh nenek moyang melalui upacara keagamaan. Pada waktu itu pertunjukan wayang dilakukan oleh kepala keluarga untuk melihat roh orang yang sudah meninggal. Pertunjukan wayang mengalami perkembangan fungsi tersendiri dari suatu kelas tertentu yang kemudian dipimpin oleh seseorang yang disebut *syaman* atau dalang. Wayang terus berkembang yang fungsi intinya sebagai bentuk kepercayaan atau religius. Pergelaran wayang seiring dengan perkembangannya pada 18 Agustus 1945 telah diakui sebagai kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang berwujud seni klasik tradisional. Pewayangan dan pedalangan tidak hanya menjadi garapan para seniman, namun telah menjadi milik semua lapisan masyarakat khususnya pemerintah dalam membina kebudayaan nasional. Dalam buku ini pembahasan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini yaitu, mengenai wayang purwa kulit dalam zaman merdeka. Pada masa itu wayang

¹⁶Sri Mulyono, *Wayang, Asal Usul, dan Masa Depan* (Jakarta: cetakan 3., CV Haji Masagung, 1989)

mengalami perkembangan dengan banyaknya perhatian dari masyarakat maupun pemerintah yaitu dengan penyelenggaraan kegiatan pewayangan seperti kongres pedalangan dan sarasehan pekan wayang Indonesia pertama pada 1969 yang menelaah peranan dalang dan pertunjukan wayang dalam masyarakat dan dalam pembangunan negara pada umumnya.

Pustaka kedua adalah buku karya Victoria M. Clara van Groenendael berjudul *Dalang di Balik Wayang*.¹⁷ Buku ini membahas tentang seluk beluk dunia pedalangan yang berisi pemaparan mengenai perubahan apresiasi peranan dalang di dalam masyarakat Jawa. Perkembangan masyarakat yang ditandai dengan semakin berkembangnya tingkat rasionalitas di dalam masyarakat memengaruhi pandangan hidup Jawa tradisional. Hal itu ditunjukkan dengan terbukanya sekolah-sekolah dalang yang mengubah peranan tradisional dalang yang sosio-religius dan berkembang menjadi dalang sebagai seniman yang kritis dalam masyarakat moderen. Perubahan tersebut terkait ungkapan dalang untuk menanggapi harapan yang dikemukakan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya sehubungan dengan peranannya dalam memodernisasi rakyat. Kajian dalam karya tersebut di antaranya membahas mengenai pendidikan dalang, arti penting silsilah dalang, gaya dan ragam bahasa dalam tradisi dalang, dalang keraton, perjanjian antara dalang dan penanggap, kesempatan-kesempatan ketika dalang tampil bermain, elite baru dalang dan pergelaran. Dalam buku ini pembahasan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai peranan dalang dalam pergelaran wayang, serta hubungan antara dalang dan pemerintah pada masa Orde Baru terkait dengan peranan dalang dalam mewujudkan cita-cita Orde Baru dalam menyukseskan rencana pembangunan Repelita 1969 yang berlanjut pada rencana pembentukan organisasi pedalangan.

Pustaka ketiga adalah disertasi karya Kanti Wiludjeng Walujo yang berjudul “Peranan Dalang Wayang Kulit dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Pembangunan

¹⁷Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987)

di Kabupaten Bantul, Yogyakarta”.¹⁸ Disertasi ini membahas mengenai kemampuan dalang dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Dalang mempunyai berbagai cara dalam menyampaikan pesan pembangunan yang disampaikan melalui adegan *jejer* pertama dan adegan *gara-gara* yang banyak menampilkan *dahgelan* tokoh-tokoh *punakawan* seperti Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar. Penyajian pesan-pesan pembangunan disampaikan dalang dalam bentuk dialog dua atau tiga tokoh-tokoh pewayangan, *dahgelan* atau humor di antara para *punakawan*, dan *tembang* atau nyanyian baik yang dinyanyikan dalang maupun *pesindhen*. Pada dasarnya setiap dalang dapat menyampaikan pesan pembangunan melalui adegan di setiap *jejer* sesuai dengan *pakem* yang berlaku. *Gara-gara* adalah suatu adegan yang banyak diminati oleh para dalang karena sifatnya yang bebas dalam membahas masalah negara dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa.

Pembinaan pedalangan dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun swasta yang tergabung dalam organisasi pedalangan. Instansi pemerintah yang terlibat dalam pembinaan pedalangan antara lain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Penerangan, dan Pemerintah Daerah. Organisasi swasta yang juga melakukan pembinaan pedalangan meliputi PEPADI, GANASIDI dan SENAWANGI. Pembinaan pedalangan yang dikelola oleh pihak swasta ini lahir dari gagasan Presiden Soeharto yang dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (REPELITA). Dalam kajian ini yang relevan untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu peranan dalang dalam menyampaikan pesan pembangunan dan hubungan dalang dengan instansi pemerintah dan organisasi swasta yang menjadi tempat bernaung para dalang untuk mendapat pembinaan.

Pustaka keempat adalah buku karya M. Jazuli yang berjudul *Dalang, Negara, dan Masyarakat: Sosiologi Pedalangan*.¹⁹ Buku ini membahas mengenai dalang

¹⁸Kanti Wiludjeng Walujo, “Peranan Dalang Wayang Kulit dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Pembangunan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta” (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, 1992)

¹⁹M. Jazuli, *Dalang, Negara, dan Masyarakat: Sosiologi Pedalangan* (Semarang: LIMPAD, 2003)

dalam persepektif hubungan negara dengan masyarakat. Perpektif dalang sebagai seniman pedalangan mempunyai hubungan terhadap status dan peranannya dalam kehidupan sosial. Dalang yang memiliki fungsi sosial sebagai media komunikator, fasilitator, dan mediator menunjukkan bahwa dalang dapat memberikan hiburan dan penerangan, menerjemahkan dan mengembangkan gagasan, serta dapat menyampaikan pesan sesuai dengan keterampilannya. Hubungan dalang dengan beberapa pihak di antaranya pemerintah dan masyarakat merupakan hubungan yang terkait dalam kehidupan profesi dalang antara kedua belah pihak sebagai penanggap dan penonton. Citra pemerintah dalam persepektif dalang adalah sebagai aparat yang meletakkan aturan dan kebijakan negara demi mencapai suatu tujuan bersama, sehingga dapat menjadi pelindung dan pengatur bagi kehidupan warganya. Citra rakyat dalam persepektif dalang adalah sebagai warga negara yang dapat membantu pemerintah dalam menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian negara dengan cara ikut serta membangun negara untuk kebaikan bersama dan salah satu tujuannya untuk mematuhi aturan kebijakan pemerintah. Dalam pustaka ini yang dapat digunakan sebagai suatu acuan dalam penelitian yaitu dengan melihat fungsi dalang sebagai pelaksana kebijakan pemerintah dan kontribusinya di tengah masyarakat, yang dalam hal ini berkaitan dengan peranan PEPADI dalam mendukung program pemerintah sebagai agen komunikator untuk menyosialisasikan program kepada rakyat.

Pustaka kelima adalah disertasi karya Dhanang Respati Puguh yang berjudul “Mengagungkan Kembali Seni Pertunjukan Tradisi Keraton: Politik Kebudayaan Jawa Surakarta, 1950-an-1990-an”.²⁰ Disertasi ini membahas mengenai pembentukan pusat-pusat kebudayaan Jawa yang di antaranya meliputi pendirian Konservatori Karawitan Indonesia, dan Akademi Seni Karawitan Indonesia. Pendirian beberapa pusat kebudayaan Jawa ini di antaranya yaitu membahas mengenai pengajaran di bidang seni pedalangan yang telah berlangsung sejak Orde Lama. Pendidikan formal seni pedalangan ini memberikan pengaruh lahirnya

²⁰Dhanang Respati Puguh, “Mengagungkan Kembali Seni Pertunjukan Tradisi Keraton: Politik Kebudayaan Jawa Surakarta, 1950-an-1990-an” (Disertasi pada Program Doktor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, 2015)

dalang-dalang yang pada akhirnya dapat melestarikan kebudayaan Jawa. Dalam Disertasi ini yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan kondisi yang melatarbelakangi pembentukan organisasi dalang yang memiliki hubungan dengan kondisi seni pedalangan pada masa Orde Lama terhadap pembinaan dalang yang dilakukan melalui beberapa sekolah formal, dan kursus pedalangan yang mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat.

Pustaka keenam, buku karya Tod Jones yang berjudul *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama abad ke-20 hingga Era Reformasi*.²¹ Buku ini membahas mengenai kebijakan budaya dari 1950-2003. Pembahasan difokuskan pada perubahan kebijakan kebudayaan selama Demokrasi Terpimpin, sampai pada Orde Baru sebagai sebuah proses budaya yaitu kebudayaan nasional di bawah rezim otoritarian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Dalam buku ini pembahasan yang relevan dan terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai kebijakan budaya pada masa Orde Lama dengan masuknya partai beraliran komunis yang mengambil peranan dalam bidang kebudayaan dan kebijakan budaya menuju Orde baru dengan pergantian rezim menuju kebudayaan yang dipengaruhi oleh pemerintah dalam memberikan bimbingan budaya.

Dari tinjauan pustaka di atas tersirat beberapa hal yang penting untuk disampaikan. Kajian seni pedalangan telah banyak dilakukan oleh para sejarawan maupun para peneliti di bidang seni pedalangan, di antara kajian-kajian itu belum ada satu pun kajian yang membahas tentang organisasi pedalangan PEPADI, namun beberapa pengkaji itu telah menyebut keberadaan organisasi tersebut. Berdasar studi-studi yang telah dilakukan itu, menurut penulis studi yang secara khusus memfokuskan pada Persatuan Pedalangan Indonesia dalam periode 1971-2013 sebagai studi sejarah belum dilakukan. Oleh karena itu, topik skripsi ini dapat dikatakan memiliki orisinalitas.

²¹Tod Jones, *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia Kebijakan Budaya selama Abad ke 20- hingga Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta, 2015)

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu.²² Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendeskripsikan secara analitis mengenai pembentukan organisasi PEPADI sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk mendidik dan membina para dalang, pengrawit, dan swarawati, serta peranannya dalam pembinaan dunia seni pedalangan.

Menurut Moenir, organisasi adalah suatu bentuk kerja sama manusia yang di dalamnya terdapat empat unsur yaitu, manusia, adanya cita-cita, adanya kerja sama dan legalitas (pengesahan). Organisasi berfungsi sebagai wadah, alat, dan sistem. Organisasi sebagai wadah, organisasi harus memberikan status yang jelas kepada seseorang yang ada dalam organisasi itu, baik dalam hal ikatan, kedudukan, dan peranan. Organisasi sebagai alat, bahwa ia harus tersusun secara efektif dan efisien dari segi struktur, personalia, dan pembagian kerja yang tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi sebagai sistem terdiri dari tiga subsistem saling tergantung, saling berpengaruh dan saling berhubungan untuk menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari organisasi.²³ Suatu organisasi membutuhkan peranan dalam menjalankan sistem di dalam organisasi. Menurut Soerjono Soekanto peranan merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status). Peranan menjadi seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya yang meliputi suatu norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dalam hal ini mencangkup suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.²⁴

²²Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1993), hlm. 2.

²³Drs. A.S. Moenir, *Pembinaan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian* (Jakarta: Gunung Agung, 1983), hlm. 87

²⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 243-244.

Menurut S.Haryanto peranan dalang yang merupakan figur sentral dalam seni pewayangan yang mempunyai berbagai fungsi sebagai seniman, juru didik, juru dakwah, juru hiburan, komunikator sosial, dan pelestari seni budaya.²⁵ Pada pertunjukan wayang seorang dalang bertindak sebagai komunikator, inovator, dan emansipator. Dalang dalam posisi tersebut mempunyai peranan di antaranya untuk menyampaikan suatu pesan pembangunan yang ditempatkan pada suatu adegan tertentu. Seorang dalang dalam menyajikan *pakeliran*-nya seharusnya dapat menempatkan diri pada suatu posisi yang tidak statis atau dalam hal ini dalang diharapkan mampu menciptakan suatu karya seni yang memiliki relevansi terhadap suatu zaman, dan dalang dalam perannya juga dapat memberikan kemampuan kepada para penonton untuk mampu berimajinasi terhadap kepekaan rasa dalam meningkatkan suatu perkembangan kepribadian yang lebih tinggi.²⁶ Sehubungan dengan hal itu, menurut Groenendael, dalang adalah tokoh utama dalam semua bentuk teater wayang. Dia adalah penutur kisah, penyanyi lagu (*suluk*), yang mengajak memahami suasana pada saat tertentu, pemimpin suara *gamelan* yang mengiringi, dan di atas segalanya itu, dialah pemberi jiwa pada boneka atau pelaku-pelaku pada manusianya itu.²⁷ Menurut Claire Holt, dalang adalah kekuatan sentral dari dunia wayang, penulis cerita dan produser, juru cerita utama dan konduktor, ia adalah pencipta serta penggerak utama dari dunia bayangan yang ilusif.²⁸

Kanti Walujo menggambarkan bahwa pertunjukan wayang adalah suatu bentuk kesenian yang bersifat hiburan yang melibatkan banyak orang sebagai pendukung, baik penabuh *gamelan* (*niyaga*) maupun yang menyajikan lagu (*pesindhen*), yang dipimpin oleh seorang dalang dengan memainkan boneka wayang yang berbentuk pipih dan terbuat dari kulit serta boneka. Wayang merupakan salah satu bentuk

²⁵S.Haryanto, *Pratiwimba Adiluhung Sejarah dan Perkembangan Wayang* (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 2.

²⁶Soetarno, "Gaya Pedalangan wayang kulit purwa serta perubahannya", hlm. 8-9.

²⁷Victoria M. Clara van Groenendael, *Dalang di Balik Wayang*, hlm. 6

²⁸Claire Holt, *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*, diterjemahkan oleh R.M. Sudharsono (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 175

manifestasi fungsi media komunikasi yang dijadikan objek pembinaan pemerintah dalam menyukseskan pembangunan. Hal ini disebabkan wayang kulit sebagai suatu bentuk teater yang bisa diterima dalam lingkungan sosial budaya yang mempunyai eksistensi serta kelangsungan hidup yang diapresiasi. Dalam kehidupan sosial politik, seorang dalang mempunyai dua fungsi utama, yaitu pertama menyampaikan pesan-pesan pemerintah pada rakyatnya, dan kedua mencerminkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.²⁹

PEPADI adalah organisasi sosial budaya yang beranggotakan para dalang, pengrawit, swarawati, dan pengrajin wayang. PEPADI dibentuk dengan tujuan agar seluruh organisasi pedalangan dan para dalang terhimpun menjadi satu dalam suatu wadah dan melestarikan dan mengembangkan seni pedalangan dan wayang pada umumnya.³⁰ PEPADI menentukan arah kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang menjadi modal dasar bagi perkembangan suatu organisasi. Kebijakan yang dirumuskan oleh PEPADI sesuai dengan visi dan misi organisasi, dengan dilaksanakannya Musyawarah Nasional sebagai ketentuan keputusan yang mengarah dalam menjalankan suatu program-program. Musyawarah Nasional tersebut dilaksanakan untuk menetapkan ketua umum dan para pengurus serta melaksanakan suatu perencanaan kegiatan organisasi. Pemilihan ketua umum dan pengurus ini menjadi suatu arah hubungan yang saling memiliki keterkaitan untuk terus meningkatkan perkembangan suatu organisasi. Adanya perencanaan kebijakan dan pemilihan ketua umum menjadikan PEPADI memiliki fungsi dan peranan dalam mencapai visi dan misi organisasi PEPADI. Dengan dibentuknya organisasi PEPADI, diharapkan para seniman pedalangan dapat menjalankan fungsinya sebagai sebagai media komunikator dan media hiburan dalam masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi sebagai sarana pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

²⁹Kanti Walujo, *Dunia Wayang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 9.

³⁰Solichin, dkk. *Ensiklopedia Wayang Indonesia Edisi Revisi Aksara S* (Bandung: Mitra Sarana Edukasi, 2016), hlm. 116

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah kritis, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis, rekaman dan peninggalan masa lampau.³¹ Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka aktivitas yang dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.³² Langkah pertama, heuristik merupakan suatu kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan atau relevan dengan tujuan penelitian, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan melalui wawancara dengan beberapa informan. Sumber-sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini yaitu arsip PEPADI Pusat seperti hasil MUNAS (Musyawarah Nasional PEPADI), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PEPADI, majalah-majalah terbitan PEPADI dan SENAWANGI, serta wawancara dengan ketua PEPADI sesuai dengan periode kepemimpinannya. Sementara itu, sumber-sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka di Perpustakaan kantor SENAWANGI, perpustakaan daerah, dan Perpustakaan Departemen Sejarah Universitas Diponegoro.

Setelah sumber-sumber terkumpul, langkah selanjutnya adalah verifikasi atau penilaian sumber atau biasa disebut dengan kritik, yaitu kegiatan menilai dan menguji keautentikan sumber-sumber sejarah yang diperlukan baik kritik terhadap bentuk atau fisik (kritik eksteren) maupun isi sumber (kritik interen). Kritik eksteren bertujuan untuk menilai dan menguji apakah sumber itu secara fisik memang sumber asli yang dibutuhkan. Sementara itu, kritik interen bertujuan untuk memperoleh informasi yang kredibel atau bisa dipercaya, yang dalam ilmu sejarah disebut dengan istilah fakta sejarah (*historical fact*). Untuk itu, penulis berupaya

³¹Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 4.

³²Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

memanding-bandingkan sumber-sumber tertulis dan wawancara guna memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tahap berikutnya adalah interpretasi yaitu sebuah langkah menafsirkan fakta-fakta yang telah diperoleh melalui sumber sejarah yang telah berhasil dikumpulkan dengan cara menyeleksi, menyusun, memberi atau mengurangi penekanan, dan menata fakta-fakta itu ke dalam urutan tertentu.³³ Interpretasi atau sintesis, yaitu kegiatan memaknai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh melalui kritik sumber, dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta tersebut dalam hubungan yang harmonis, yaitu hubungan kronologis dan hubungan kausal atau sebab akibat.

Langkah terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi masa lampau dalam bentuk kisah sejarah yang harus dituangkan secara tertulis.³⁴ Dalam tahapan ini penulis menyajikan cerita sejarah yang kronologis dan berdasarkan fakta. Tujuannya agar setiap fakta-fakta sejarah yang disajikan dapat disusun menjadi sebuah rangkaian kisah sejarah dalam berbagai bentuknya, yang dalam hal ini adalah skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berjudul “Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang (1971-2013)” ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan.

Bab I Pendahuluan terdiri dari enam subbab. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi yang Melatarbelakangi Perkembangan Organisasi Pedalangan. Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa Subpokok bahasan yang meliputi kondisi seni pedalangan pada masa awal kemerdekaan yang membahas mengenai pendirian beberapa sekolah formal dan kursus pedalangan dan kebijakan

³³Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 144.

³⁴Tim Revisi, *Pedoman Penulisan skripsi sejarah* (Semarang: Jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, 2014), hlm. 30

pada masa Orde Lama terhadap seni pedalangan. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan mengenai kondisi pedalangan pada masa Orde Baru, yang meliputi kebijakan Orde Baru, dan kehidupan dunia seni pedalangan pada masa Orde Baru. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai kondisi seni pedalangan pada masa reformasi, yang meliputi kebijakan masa reformasi, kehidupan dunia seni pedalangan masa reformasi.

Bab III Pembentukan Organisasi Pedalangan. Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa Subpokok bahasan yang meliputi pembentukan GANASIDI yang menjadi akar dari terbentuknya organisasi pedalangan PEPADI. Selain itu dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai proses pembentukan PEPADI sebagai organisasi pedalangan nasional.

Bab IV Kelembagaan Persatuan Pedalangan Indonesia. Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa Subpokok bahasan yang meliputi kepengurusan dan keanggotaan, kebijakan dan program kerja, serta pendanaan dan mitra kerja sama PEPADI sesuai dengan periode kepemimpinan Ketua Umum PEPADI yaitu sampai dengan periode 2013.

Bab V Peranan Persatuan Pedalangan Indonesia dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang. Dalam bab ini dibahas mengenai beberapa Subpokok bahasan meliputi pertama peningkatan kompetensi dalang yang dibagi menjadi tiga bagian subbahasan yaitu sarasehan, lomba, dan konsolidasi sanggar. Kedua yaitu penguatan eksistensi dalang yang dibagi menjadi lima bagian meliputi pergelaran, festival, pemberian penghargaan, dan pelibatan dalam misi kesenian.

Bab VI Simpulan yang merupakan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini.